

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Adityabakti: Bandung.
- Aditya, U. R. (2015). *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Pustaka Magister: Semarang.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press: Banten.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha: Jakarta.
- Firman, W. (2012). *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Penaku: Jakarta.
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deeppublish: Sleman. 2019.
- Iskandar, O. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*. CV. Budi Utama: Sleman.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Marzuki, M. P. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram.
- Riadi, E. (2011). *Statiska Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS*. Jogjakarta.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media: Surabaya.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Wignjosobroto, S. (2013). *Hukum Konsep Dan Metode*. Setara Press: Malang.
- Zainaluddin, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Tertentu.

C. Skripsi/Jurnal

Afdhali, D. R. dan Taufiqurrohman Syahuri. (2023). Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Jurnal*. Vol. 6 (2).

Anshori, A. Z. (2024). Analisis Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *DINAMIKA*. Vol. 30 (2).

Asliani dan Ismail Koto. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 3. (2).

Dahwir, A. (2023). Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Unpal*. Vol. 21 (3).

Dewi, D. W. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 2 (2).

Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Al-Qadlu*. Vol. 6 (1).

- I.W.P. Sucana Aryana. Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi. *Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*.
- Jardan, G. dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidananarkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru). *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 7 (2).
- Kristiyani, M. dan Vieta Imelda Cornelis. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Binamulia Hukum*. Vol. 12 (1).
- Liandiana, R. N. (2019). Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Lilik. M. (2014). Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3 (2).
- Milzam, F. T. dan Sutrisno. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3 (3).
- N. T. Saristha. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*. Vol. II. (2).
- Peters, A. (2018). Corruption as a Violation of International Human Rights. *The European Journal of International Law*. Vol. 29 (4).
- Prayoga, D. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 2 (2).
- Purnama, C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Di Indonesia. *SANKSI*. Vol. 2 (1).
- Raharja, I. M. R. O. dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 6 (1).

- Rahman, A. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah RI Nomor: 920K/Pid.sus/2013). *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 1 (1).
- Rismoyo, A. K. (2017). Kontribusi Justice collaborator Pada Tindak Pidana Tertentu Sebagai Pengurangan Masa Pidana. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Sihite, F. B. dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator. *Jurnal Hukum To-Ra*. Vol. 9 (1).
- Sugistiyoko, B. S. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana. *Yustiabelen*. Vol. 5 (1).
- Sunardi, D. dkk. (2024). Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Melindungi Justice Collaborator Di Indonesia. *SELISIK*. Vol. 10 (2).
- Syarif, D. J. M. dkk. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*. Vol. VIII (4).
- Widiyanti, A. Penerapan Justice Collabolator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Undaris.

D. Internet

- Gramedia, “Pengertian Deskriptif, Kreteria Dan Ciri-Cirinya”, <http://www.Gramedia.com/Literasi/.Penelitian-Deskriptif/>. Diakses Tanggal 04 September 2024.
- Identitas.Com, <https://Identitas.Com/Penelitian-Hukum-Dikelompokkan-Berdasarkan-Sifat-Dan-Faktor-Kajian/>, Diakses Tanggal 04 September 2024.
- Javier Faisal, “Kejaksaan Jadi Instansi Pemberi Status Justice collaborator Kasus Korupsi Terbanyak”, <https://data.tempo.co/data/1282/kejaksaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice-collaborator-kasus-korupsi-terbanyak>. Akses tanggal 19 Oktober 2024.
- Savitri Putu Indah, “BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa”, <https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>. Akses tanggal 18 Oktober 2024.